

Pendampingan Manajemen Mutu Sekolah Berbasis Delapan Standar Nasional Pendidikan di SDN Randegan Kulon II Majalengka

Sari Hidayaningsih¹, Dede Nia Kurnia², Nuruddin Araniri³,
Syafa'atun Nahriyah⁴, M.Saroni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Majalengka

¹rie.hiednings099@gmail.com, ²deniartgallery07@gmail.com

³siuddin1308@unma.ac.id, ⁴syafaatunnahriyah@unma.ac.id,

⁵msaroni@unma.ac.id.

Abstrak

Pedoman Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar sistem jaminan mutu nasional di terapkan di SDN Randegan Kulon II berlokasi di Kecamatan Jatitujuh Majalengka. Adanya ada beberapa tantangan yaitu jumlah dan kapasitas kemampuan guru, kondisi pelayanan digital saat ini masih adanya ketergantungan pada alokasi anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat memberi pelayanan dalam penguatan pengelolaan sistem mutu sekolah berstandar SNP menjadi lebih fleksibel. Bentuk kegiatan dituangkan dalam bentuk pendampingan, pelatihan penyusunan dokumen mutu, mentoring pada pengintegrasian sistem kurikulum dan penilaian serta evaluasi praktik pembelajaran di kelas. Program PkM dilakukan menjadi beberapa tahapan yaitu tahapan sosialisasi, lokakarya teknis, mentoring lapangan serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman guru terhadap SNP, penyusunan dokumen perencanaan sekolah yang lebih baik, Rencana Kerja Sekolah dan pembelajaran yang lebih sederhana dalam prinsip kurikulum. Ada peningkatan partisipasi anggota komite sekolah untuk sistem pengelolaan sekolah yang lebih transparan dan akuntabel. Output PkM sebagai penguatan dari SNP berfokus pada kompetensi kualitas pembelajaran guru yang profesional meningkat. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan SNP yang dilakukan SDN Randegan Kulon II telah mengarahkan untuk beradaptasi dan berintegrasi pada budaya mutu.

Kata kunci: implementasi SNP, Manajemen mutu sekolah, Pengabdian kepada Masyarakat

Abstract

The National Education Standards (SNP) serve as the foundation of Indonesia's national quality assurance system and are implemented at SDN Randegan Kulon II, located in Jatitujuh District, Majalengka. In practice, the school continues to face several challenges, including the limited number and capacity of teachers, suboptimal digital service conditions, and dependence on government funding. Considering these circumstances, the Community Service (PkM) program was conducted to strengthen the school's quality management system based on the SNP in a more flexible and structured manner. The activities included mentoring, training in the preparation of quality documents, guidance on integrating curriculum and assessment systems, as well as evaluating classroom learning practices. The PkM program was carried out in several stages, namely socialization, technical workshops, field mentoring, and monitoring and evaluation. The results indicated an improvement in teachers' understanding of the SNP, better development of school planning documents such as the School Work Plan (RKS), and more streamlined learning processes aligned with curriculum principles. Additionally, the participation of the school committee increased, supporting more transparent and accountable school governance. The outcomes of this PkM demonstrate that strengthening SNP implementation contributes to improving teachers' competencies and professionalism. Thus, the application of SNP at SDN Randegan Kulon II has gradually directed the school toward adapting to and integrating a sustainable quality culture.

Keywords: SNP Implementation, School Quality Management, Community Service

A. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan nasional merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Upaya peningkatan mutu ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN, 2003) dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahan-perubahannya. Kedua regulasi tersebut menetapkan Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan minimal penyelenggaraan pendidikan. Delapan standar ini mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Keseluruhan standar dirancang sebagai instrumen penjaminan mutu di tingkat nasional (Kemendikdasmen, 2021). Konsistensi implementasi SNP menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyamakan mutu pendidikan di berbagai satuan pendidikan (Depdiknas, 2005).

Implementasi SNP di sekolah-sekolah pedesaan masih memiliki banyak tantangan. SDN Randegan Kulon II di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, misalnya, merupakan sekolah pedesaan dengan banyak kendala yang masih memiliki keterbatasan fasilitas TIK, perlunya tambahan lab, dan rasio guru, rasio siswa yang terpaut jauh serta bergantung pada Dana BOS, dan program sekolahnya dijalankan.

Namun untuk memenuhi berbagai tantangan yang sudah dipaparkan, perlu dilakukan pengawalan yang direncanakan dan berkelanjutan sehingga kegiatan pengelolaan mutu yang berbasis Standar Nasional Pendidikan berjalan dengan lebih optimal. Dari sisi ini, keberadaan Program Pengabdian Masyarakat atau yang biasa diberi singkatan PkM dipandang sesuai karena mampu memberikan bantuan pada guru-guru untuk upgrade kompetensi serta mendorong peningkatan perencanaan di sekolah. Dengan adanya bantuan ini, tidak hanya halnya sekolah mampu berubah sesuai arah kebijakan.

Aktivitas PkM ini dipusatkan pada upaya pengembangan pemahaman dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam merealisasikan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk membantu sekolah agar perbaikan pengelolaannya dilakukan dengan penguatan Manajemen Berbasis Sekolah serta untuk tumbuhnya budaya mutu yang mampu dilaksanakan berkelanjutan di SDN Randegan Kulon II. Keunggulan dari keberadaan program ini berada pada model pendampingannya yang bertumpu pada standar mutu nasional namun tidak menghilangkan sesuatu kondisi sebenarnya di sekolah yang berada di pedesaan. Model ini mampu membuka kesempatan bagi program ini untuk menjadi acuan bagi penerapan sekolah lain.

B. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di SDN Randegan Kulon II di bulan November 2025 dan melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Rangkaian kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan nasional dan urgensi Delapan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan manajemen mutu. Sosialisasi ini bertujuan menyelaraskan pemahaman seluruh warga sekolah terhadap standar mutu yang harus dicapai. Tahap berikutnya adalah workshop teknis yang berfokus pada penguatan kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, penerapan pembelajaran aktif sesuai Kurikulum Merdeka, serta pengembangan asesmen autentik. Workshop juga mencakup

pendampingan penyusunan dan perbaikan dokumen mutu seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS), perangkat supervisi akademik, dan standar operasional prosedur pengelolaan sekolah.

Selanjutnya dilakukan pendampingan lapangan melalui observasi pembelajaran, konsultasi berkala, dan bimbingan pemanfaatan media pembelajaran digital. Pendampingan ini memastikan implementasi SNP benar-benar tercermin dalam praktik pembelajaran maupun tata kelola sekolah. Keseluruhan kegiatan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi melalui peninjauan dokumen, wawancara singkat, serta refleksi bersama untuk menilai efektivitas pendampingan dan kebutuhan tindak lanjut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pendampingan implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SDN Randegan Kulon II menunjukkan adanya langkah terencana dari pihak sekolah dalam merespons kebijakan pendidikan nasional. SNP sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan telah menjadi kewajiban satuapendidikan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 dan diperkuat melalui PP Nomor 57 Tahun 2021(BSNP, 2006)(Kemendikdasmen, 2021). Melalui rangkaian kegiatan berupa sosialisasi, workshop, dan pendampingan berkelanjutan, sekolah mampu memperbaiki penerapan standar yang sebelumnya belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya, sebuah kondisi yang umum ditemukan pada sekolah di wilayah pedesaan (Bank, 2020)



Foto 1 Sosialisasi Delapan Standar Nasional Pendidikan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Perkembangan paling terlihat terdapat pada standar isi dan standar proses. Guru mulai menggeser pola pembelajaran ke arah yang lebih aktif dan kontekstual, dengan melibatkan siswa secara langsung melalui pendekatan kreatif, termasuk pembelajaran berbasis proyek pada beberapa kelas.

Perubahan ini sejalan dengan temuan Ason menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SNP sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yang beragam (Ason, 2020). Namun demikian, keterbatasan teknologi pembelajaran masih menjadi kendala utama. Minimnya media digital dan bahan ajar berbasis TIK menyebabkan integrasi pembelajaran digital belum berjalan optimal, sebagaimana juga dilaporkan oleh Rahmi dalam studi implementasi SNP di sekolah dasar(Rahmi, 2021).

Dari sisi kepemimpinan, kepala sekolah berperan signifikan sebagai penggerak peningkatan mutu pendidikan. Berbagai inovasi dilakukan dalam penguatan standar proses dan standar pengelolaan, antara lain melalui pengembangan minat dan bakat siswa serta pembiasaan nilai religius dan karakter. Praktik tersebut mencerminkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan partisipasi warga sekolah dan kemandirian dalam pengelolaan internal (Mulyasa, 2018). Penerapan MBS di SDN Randegan Kulon II terlihat dari keterlibatan aktif guru dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan serta pengawasan program, selaras dengan rekomendasi PSKP

(2025) mengenai pentingnya peran komunitas sekolah dalam percepatan peningkatan mutu pendidikan.

Pada standar kompetensi lulusan, capaian sekolah tergolong baik dengan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang mencapai 85%. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan hasil belajar pada siswa dengan tingkat kehadiran yang rendah. Fenomena ini sejalan dengan temuan World Bank di sejumlah wilayah rural di Indonesia (Bank, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terfokus bagi siswa rentan, sekaligus penguatan kerja sama antara sekolah dan orang tua, sebagaimana ditegaskan oleh (Tilaar, 2009) bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk mutu pendidikan.



Foto 2 Diskusi Delapan Standar Nasional Pendidikan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Ditinjau dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian besar guru telah memenuhi kualifikasi akademik sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Namun, kemampuan guru dalam menerapkan penilaian autentik dan memanfaatkan teknologi pembelajaran masih perlu ditingkatkan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 2007).

Selain itu, rasio guru dan murid yang relatif tinggi serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata turut memengaruhi kualitas pembelajaran, sebagaimana disampaikan Nasyirwan dalam kajiannya terkait pencapaian SNP di satuan pendidikan (Nasyirwan, 2015).

Pada aspek sarana dan prasarana, sekolah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran. Meskipun ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan sekolah tersedia dalam kondisi cukup baik, fasilitas TIK dan laboratorium sains masih sangat terbatas. Akses internet yang hanya menjangkau sekitar 40% menjadi hambatan serius dalam pengembangan pembelajaran berbasis STEAM. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wakimin yang menyebutkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala utama dalam implementasi SNP di daerah (Wakimin, 2012). Oleh karena itu, revitalisasi sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak agar pemenuhan standar dapat selaras dengan ketentuan PP Nomor 32 Tahun 2013 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Dalam hal pembiayaan, sekolah masih bergantung pada Dana BOS serta dukungan dari masyarakat. Ketergantungan pada pendanaan pemerintah daerah menyebabkan sejumlah program pengembangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini juga ditemukan oleh Zainuddin (tanpa tahun) dalam analisis pembiayaan pendidikan di wilayah Jawa Barat. Temuan tersebut menegaskan bahwa aspek pembiayaan merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan implementasi SNP, sebagaimana ditegaskan dalam rekomendasi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP, 2025).

Pada standar penilaian pendidikan, guru telah mulai menerapkan asesmen autentik yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka. Namun, pemanfaatan instrumen penilaian berbasis digital masih terbatas. Keberadaan Papan Interaktif Digital (PID) sebenarnya

membuka peluang untuk meningkatkan kualitas asesmen berbasis teknologi, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan keterampilan guru. Kondisi ini menguatkan temuan Yulianti dan Hidayat mengenai pentingnya peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan sumber belajar dan teknologi modern (Yulianti & Hidayat, 2015).

Secara keseluruhan, pendampingan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terbukti memberikan dampak positif dalam memperkuat implementasi Delapan Standar Nasional Pendidikan di SDN Randegan Kulon II. Program ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas guru, penguatan tata kelola sekolah berbasis MBS, serta meningkatnya partisipasi siswa dalam pembelajaran. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi SNP masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana digital, kompetensi pendidik, dan keberlanjutan pembiayaan sekolah. Oleh karena itu, dukungan strategis dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan menjadi faktor penting untuk memastikan upaya peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional (PSKP, 2025), (Kemendikdasmen, 2021).

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di SDN Randegan Kulon II memperlihatkan bahwa pendampingan yang mengacu pada Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu sekolah. Proses pendampingan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi kebijakan, pelaksanaan workshop teknis, pendampingan di lapangan, hingga monitoring dan evaluasi, terbukti membantu meningkatkan kapasitas guru, memperbaiki penataan dokumen mutu sekolah, serta memperkuat kualitas pembelajaran agar sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Selain itu, perubahan positif juga tampak pada aspek tata kelola sekolah, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi, yang ditunjukkan melalui peran kepala sekolah dan komite sekolah yang semakin aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Di sisi lain, penerapan SNP di sekolah masih menemui sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan utama berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana digital, kemampuan pendidik yang belum merata dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, serta keterbatasan pembiayaan yang masih sangat bergantung pada dana pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu sekolah tidak dapat hanya mengandalkan pendampingan pada tahap awal, tetapi memerlukan dukungan lanjutan berupa penyediaan fasilitas TIK yang lebih memadai, program pelatihan guru yang berkelanjutan, serta penguatan kerja sama antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, program pendampingan ini berperan penting dalam mendorong terbentuknya budaya mutu yang lebih kuat di SDN Randegan Kulon II. Temuan ini mengindikasikan bahwa model pendampingan berbasis SNP memiliki peluang untuk diterapkan sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ason, A. (2020). Analisis implementasi delapan standar nasional pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) Kabupaten Sintang. *Bestari Jurnal*, 1(1), 1–15.
- Bank, W. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. World Bank Group.
- BSNP. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Depdiknas. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Kemendikdasmen. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, (2007).
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasyirwan, N. (2015). *Pencapaian Delapan Standar Nasional Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Sekretariat Negara.
- PSKP. (2025). *Rekomendasi Kebijakan Pendidikan 2025–2029: Menuju Pendidikan Berkualitas dan Berkeadilan*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Rahmi, Q. (2021). *Implementasi Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Dasar*. Universitas Negeri Jakarta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.
- UUSPN. (2003). *UUSPN. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wakimin, W. (2012). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 023898 Binjai*.
- Yulianti, E., & Hidayat, E. (2015). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Mutu Sekolah*.